

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com

Rabu
24 April 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Baubau Kembali Pertahankan Tradisi Juara Perencana Pembangunan Daerah se Sultra



Gubernur Sultra Komjen Pol. (Purn) Dr. (HC). Andap Budi Reviyanto, SIK, MH usai menyerahkan penghargaan daerah perencana terbaik menggelar foto bersama pada kepala daerah se Sultra

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Pemerintahan kepemimpinan Dr. Muh. Rasman Manafi, SP, M.Si sebagai Pj. Wali Kota Baubau kembali memperoleh terbaik I dalam "Penghargaan pembangunan Daerah" yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2024 di puncak acara Musrenbang Tingkat Prov. Sultra, yang diselenggarakan di Sahid Azizah Convention-Kendari hari ini. (18/4).

Utusan Pemkot Dr Moh Tasdik Negosiasi Dengan Ahli Waris Bersepakat Segel SDN 2 Wajo Baubau Dibuka Agar Siswa Bisa Belajar Kembali



Dr Muh Tasdik dan Perwakilan Ahli Waris sepakat segel SDN 2 Wajo dibuka

Pewarta: Hengky TA

BAUBAU, BP-Penyegelan terhadap SDN 2 Wajo oleh pengacara

dan ahli waris lahan SDN 2 Wajo berakhir pada Minggu sore (21/4/2024) setelah ahli waris yang diwakili Darwis dan pengacaranya Moh Taufan Ahmad SH, MH membuka segel tersebut.

Lanjutkan ke Hal: 7

Bersama Dengan Lukman Abu-Nawas dan Haliana, Wabup Butur Ahli Juga Dapat Undangan dari DPP PDIP Untuk Diusung Pada Pilkada Serentak 2024

Laporan: Ardi

BURANGA, BP-Wakil bupati Buton Utara Ahli mendapat undangan rapat konsolidasi pemantapan pemenangan Pilkada serentak 2024 dari Dewan Pembina Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P).

Undangan yang ditandatangani Sekjen PDIP, Hasto

Lanjutkan ke Hal: 7



Calob Bupati Butur 2024 Ahali

Pj. Gubernur Sultra Peroleh Gelar Adat "Kolakino Liwu Pancana" atas Keadilan Restoratif di Buton Tengah



Lanjutkan ke Hal: 7

Lanjutkan ke Hal: 7

Usulan BTS Kota Baubau jadi Lima Besar Prioritas Tahun 2025



Kadis Kominfo Baubau Andy Hamzah Machmud MSi mengusul BTS untuk mengatasi Blank Spot di Kota Baubau

Pewarta: Hengky TA

BAUBAU, BP-Perhatian khusus Pj. Wali Kota Baubau Dr. Muh.

Rasman Manafi, SP, M.Si dengan mengusulkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk mengatasi

kawasan blankspot di Kota Baubau mendapat respon serius dalam

Lanjutkan ke Hal: 7



SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Baubau Kembali Pertahankan Tradisi Juara Perencana Pembangunan Daerah se Sultra

Kota Baubau, Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M.Si bersama dua kepala daerah lainnya, yakni Pj. Bupati Muna Barat dan Pj. Wali Kota Kendari, sebagai juara kedua dan ketiga.

Atas penghargaan itu, kepada media Wali Kota Rasman Manafi berharap jajarannya untuk terus berbuat yang terbaik bagi daerah, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Apresiasi besar juga kepada bapak Gubernur dan jajarannya atas penghargaan ini, dan ini merupakan bentuk nyata dari kerja bersama yang dilakukan selama ini," tandas Dr. Rasman singkat.

Kepala Bappeda Kota Baubau, Dr. Dahrul Dahlan, SSTP.,

M.Si mengemukakan, penghargaan juara ini bagi Kota Baubau adalah yang kesekian kalinya dan merupakan tradisi yang sudah di raih Kota Baubau beberapa tahun berturut-turut. "Juara ini untuk kesekian lainnya dan kita berhasil mempertahankan itu. Ini tradisi yang baik, dan memonetum juga untuk terus melakukan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi," kata Dr. Dahrul.

Sementara itu Gubernur Sultra Komjen Pol. (Purn) Dr. (HC). Andap Budi Revianto, SIK, MH dalam sambutannya usai menyerahkan penghargaan mengatakan kabupaten/kota yang sukses meraih penghargaan agar lebih presisi lagi

dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, agar daya saing Sultra lebih kompetitif di level regional dan nasional.

Dilaporkan Kepala Dinas Kominfo Kota Baubau H. Andi Hamzah, S.Sos., M.Si bahwa pada kesempatan ini pula Gubernur mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Prov. Sultra tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi, yang merupakan Perda pertama di Indonesia yang memfokuskan tentang sistem akurasi data yang bermula dari desa dan kelurahan, yang akan berdampak pada pengelolaan pembangunan yang fokus dan tepat sasaran.

Acara yang dihadiri segenap elite di Sulawesi Tenggara ini berakhir hingga pukul 13.30 wita, dan Gubernur dijadwalkan akan berangkat ke Buton Tengah. Demikian halnya Wali Kota Baubau langsung bertolak ke Baubau untuk menjemput kehadiran Gubernur di Baubau.

Sebelumnya, Di Kota Kendari Wali Kota Baubau kembali menggelar rapat daring bersama jajarannya pada malam hari mengevaluasi hasil usulan Kota Baubau di Rakortekbang Sultra, dimana setiap kepala OPD mepresentasikan pencapaian dan hasil Rakortekbang, termasuk mengevaluasi hal-hal teknis yang ditindaklanjuti secara operasional. (**)

Usulan BTS Kota Baubau jadi Lima Besar Prioritas

Rapat Kordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang) Prov Sultra yang digelar di Claro Hotel Kendari pagi tadi, 14 April 2024.

Keseriusan ini menempatkan progres ini sebagai 5 besar usulan prioritas yang disepakati Pemkot Baubau dihadapan tim teknis Pemprov. Sultra untuk selanjutnya mendapatkan perhatian khusus pada anggaran tahun 2025.

Diungkapkan Kadis Komunikasi dan Informatika Kota Bau-

bau, H. Andi Hamzah, S.Sos, M.Si usai desk Kota Baubau, bahwa ditematkannya pembangunan BTS sebagai 5 besar prioritas mengindikasikan bila program ini akan sangat menunjang keberadaan Kota Baubau sebagai daerah yang menunjang sistem digitalisasi dalam mendukung upaya Wali Kota Baubau mendorong kota ini sebagai hub maritim di kawasan Indonesia Timur.

"Itu yang pertama, jadi 5 besar prioritas utama, karena memang pembangunan

BTS ini diperebutkan kabupaten/kota di Sultra sementara pengadaannya di tingkat Provinsi sangat terbatas. Menjadi 5 besar prioritas itu, artinya Kota Baubau diutamakan, dan target yang diamanahkan Bapak Wali Kota," kata Andi Hamzah.

Oleh sebab itu pihaknya akan tindaklanjuti secara teknis dengan instansi terkait termasuk kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, untuk segera mendapatkan persetujuan teknis. (**)

Pj. Gubernur Sultra Peroleh Gelar Adat "Kolakino Liwu Pancana" atas Keadilan Restoratif di Buton Tengah

BUTENG, BP-Jumat (19/04/2024) Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, dianugerahi gelar adat "Kolakino Liwu Pancana" oleh Lembaga Adat Buton Tengah. Gelar ini mengandung pengertian "Bangsawan yang paling dimuliakan di Negeri Pancana". Pemberian gelar berlokasi di Kantor Lama Bupati Buton Tengah.

Undang-Undang Martabat Kesultanan Buton menyatakan bahwa seseorang yang diangkat menjadi bangsawan negeri karena keberaniannya, kealimannya, kerelaannya mengorbankan harta benda, dan keterampilannya.

Singkatnya, seseorang karena kelebihanya digunakan atau diabdikan untuk kepentingan membangun dan memajukan kemaslahatan negerinya. Salah satu pertimbangan pemberian gelar kepada Andap adalah pencapaiannya dalam menyelesaikan konflik di Buton Tengah pada saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Sultra.

Tanggal 7 Februari 2017 Andap menerapkan prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam menyelesaikan konflik antar

pendukung dalam kontestasi politik. Keadilan restoratif yang diinisiasinya menggunakan metode memediasi bertempat di Kantor Dinas Kesehatan, Kecamatan Lakudo.

Mediasi tersebut berjalan dengan baik, sehingga konflik pun tidak berkelanjutan dan meluas.

"Tidak pernah terbayangkan, pada hari ini saya kembali ke Lakudo untuk menerima anugerah gelar adat dari Ketua Lembaga Adat dan anggota Perangkat Lembaga Adat Kabupaten Buton Tengah atas keadilan restoratif yang saya inisiasi tujuh tahun lalu," ungkap Andap.

"Jujur saya sampaikan, saya pertimbangkan berulang kali apakah saya pantas mendapat Gelar Adat "Kolakino Liwu Pancana". Rasanya masih jauh dari optimal pengabdian yang saya lakukan di Bumi Anoa Sulawesi Tenggara tercinta, apalagi dalam kapasitas saya selaku Pj. Gubernur Sultra."

Andap mengatakan dirinya akhirnya memutuskan menerima penghargaan Gelar Adat ini, karena penganugerahan gelar tersebut menjadi momen berharga untuk menyampaikan gagasan dalam orasi budaya

yang berjudul "Hukum Progresif Lahirkan Data Budaya Pancana untuk Kesejahteraan Sosial".

Andap mengatakan, "Gagasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan pengabdian saya untuk Bumi Anoa Provinsi Sulawesi Tenggara tercinta."

Penganugerahan gelar adat Kolakino Liwu Pancana kepada Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H ditandai dengan pemasangan kampurui oleh La Gu selaku Parabela Sara Bombona Wulu Buton Tengah.

Selain itu dilakukan pemasangan keris oleh La Andi, S.Sos., selaku Parabela Sara Wasilomata Buton Tengah, dan penyerahan tongkat oleh La Musa, S.Pd. selaku Parabela Sara Lakudo Buton Tengah.

Acara adat tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati kabupaten Buton Tengah Dr. Drs. H. Andi Muhammad Yusuf, M.Si, Ketua DPRD Bobi Ertanto, S.Pd., M.H., Sekda (H. Kostantinus Bukide, S.H., M.Si, Dandim Letkol. Inf. Ketut Janji, S.H., Ketua Pengadilan Tk, Pimti Pratama Pemprov Sultra, serta Camat dan Lurah se-Kabupaten Buton Tengah. (Mashuri)

Utusan Pemkot Dr Moh Tasdik Negosiasi Dengan Ahli Waris Bersepakat Segel SDN 2 Wajo Baubau Dibuka Agar Siswa Bisa Belajar Kembali

Pembukaan segel SDN 2 Wajo tersebut turut disaksikan perwakilan Pemkot Baubau Dr Moh Tasdik bersama Kasek SDN 2 Wajo Salfina, S.Pd dan guru-guru.

Menurut Dr Moh Tasdik, pembukaan segel SDN 2 Wajo pada Minggu (21/4/2024) sudah melalui tahapan fasilitasi dan kordinasi dengan pihak Ahli waris dan pengacara yang dilakukannya secara intens setelah adanya penyegehan tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada ahli waris yang bersedia membuka kembali segel atau pagar sekolah agar anak-anak sekolah bisa melaksanakan proses belajar mengajar lagi setelah terhenti selama beberapa hari. Dan pada Senin (22/4/2024) sudah bisa lagi bersekolah di SDN 2 Wajo.

"Dalam Kapasitas saya disamping sebagai bagian dari Pemkot Baubau sekaligus sebagai Alumni SD 2 Wajo yang prihatin terhadap persoalan tanah lokasi sekolah dimaksud, dan tentu saja yang paling

utama adalah atas arahan Pj. Walikota untuk memfasilitasi kasus ini maka Kami bersepakat hari Minggu (21/4/2024) Alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan yang kita bangun bersama hari ini segel dan gembok sekolah dibuka dan anak-anak bisa bersekolah sambil menunggu rapat yang akan dilakukan baik itu dengan ahli waris maupun dengan Pemkot Baubau untuk menindaklanjuti bagaimana solusi terbaik untuk penyelesaian keputusan pengadilan," ujarnya.

Ditambahkan, Pemkot Baubau dalam hal ini Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si sangat menghargai putusan yang sudah ada namun juga tetap memcari win-win solution artinya Pemkot Baubau akan tetap berkomitmen menyelesaikan putusan pengadilan karena mempunyai keputusan yang tetap tapi jangan juga merugikan anak-anak yang bersekolah.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk SDN 2 Wajo, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman

Manafi berkomitmen dalam mengarahkan pembangunan pendidikan di Kota Baubau sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yakni peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu upaya pencapaian SPM pendidikan dan ikut mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Baubau memastikan bahwa salah satu aspek peningkatan kualitas pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP dapat terpenuhi kebutuhannya secara bertahap dan peserta didik dapat melaksanakan proses belajar dengan baik tanpa ada persoalan yg dapat menghambat proses belajar mengajar bagi guru dan murid.

Ditempat yang sama, pengacara ahli waris lahan SDN 2 Baubau Moh Taufan Ahmad SH, MH mengakui, pada prinsipnya mewakili ahli waris selaku kuasa hukumnya mengapr-

esiasi tindakan Pemkot Baubau terkhusus Dr Moh Tasdik yang kemudian boleh dikatakan melakukan komunikasi dari hari Sabtu (20/4/2024) dan getol mencari ruang bahkan kemudian mendatangi satu per satu ahli waris termasuk dirinya secara pribadi dihubungi untuk kemudian membicarakan baiknyanya seperti apa persoalan SDN 2 Wajo. Tentunya, pihaknya melihat langkah-langkah baik itu, punya nilai sosial yang kemudian dipertaruhkan juga dalam hal apakah proses penyegehan ini mau dilanjutkan atau tidak. Ternyata, memang para ahli waris memfokuskan nilai sosial itu ditonjolkan bahwa banyak adik-adik yang terhalang sekolahnya akibat penyegehan tersebut.

Moh Taufan Ahmad juga memohonkan permohonan maaf selaku perwakilan dari ahli waris karena tindakan penyegehan. Dan tidak ada alasan lain serta tidak ada langkah lain sebab pihaknya hanya membutuhkan penegehan ataupun tindakan tegas dari Pemkot Baubau. (**)

Bersama Dengan Lukman AbuNawas dan Haliana, Wabup Butur Ahali Juga Dapat Undangan dari DPP PDIP Untuk Diusung Pada Pilkada Serentak 2024

Kristiyanto dan ketua panitia M. Prananda Prabowo ditunjukkan kepada seluruh calon kepala Daerah yang akan diusung untuk bertarung pada Pilkada

serentak 2024.

Ahali mengaku, mendapatkan undangan tersebut dari sekretaris DPC PDIP Buton Utara, Fatriah.

"Saya mendapat undangan terkait konsoli-

dasi pencalonan kepala daerah seluruh Indonesia. Saya dapat surat itu dari sekretaris DPC PDIP Butur ibu Fatriah, " kata Ahali saat dikonfirmasi melalui telepon

selulernya, Minggu 21 April 2024.

Mantan Kasat Reskrim Polres Wakatobi ini mengungkapkan, dalam isi surat tersebut sudah ditentukan calon-calon kepala daerah yang akan

diusung partai PDI Perjuangan pada Pilkada serentak 2024.

"Isi surat itu masing-masing kabupaten, provinsi sudah ditentukan calon-calon kepala daerahnya dari PDI P. Provinsi Sultra calonnya Pak Lukman Abunawan, calon bupati Wakatobi, Haliana, calon bupati Buton Utara, Ahali S.H., M.H., " ungkapnya.

Ahali menambah,

rapat konsolidasi yang bakal digelar di sekolah partai DPP Partai Persatuan Demokrasi Indonesia Perjuangan pada 25 April 2024 mendatang, seluruh kepala daerah yang akan dicalonkan diundang.

"Seluruh (calon kepala Daerah) Indonesia itu diundang untuk membahas konsolidasi di sekolah partai PDI P di Lencana Agung nomor 98 Jakarta Selatan,

"tambahnya. Untuk diketahui, ada beberapa daerah di Sultra yang tidak diundang untuk mengikuti rapat konsolidasi tersebut lantaran diduga belum jelas siapa yang akan dicalonkan pada Pilkada serentak 2024. Seperti Muna, Kolaka, Koltim, Kolut, Konawe, Konawe Kepulauan, Konsel, Buton, Busel, Kota Kendari, dan Kota Baubau. (*)

MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024



Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kedua kanan) didampingi anggota Majelis Hakim MK Saldi Isra (kedua kiri), Arief Hidayat (kanan), dan Enny Nurbaningsih (kiri) saat sidang di MK beberapa waktu lalu

Laporan: Hadi

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 baik yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Senin (22/4).

Dengan demikian paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap menjadi pemenang seperti yang ditetapkan KPU sebelumnya.

Sebelumnya, pada Senin siang, Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan yang menolak permohonan yang dimaksudkan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang teregister dengan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan

atas permohonan AMIN, Senin siang.

Selanjutnya, pada sore hari, MK membacakan putusan yang menolak permohonan yang dimaksudkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang teregister dengan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya," demikian amar putusan MK yang dibacakan Suhartoyo atas permohonan Ganjar-Mahfud, Senin petang.

Dalam dua perkara ini, AMIN dan Ganjar-Mahfud selaku pemohon tidak terima dengan ha-

sil keputusan KPU pada 20 Maret lalu yang memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Sementara itu, KPU duduk sebagai termohon dan Prabowo-Gibran duduk sebagai pihak terkait.

Para pihak yang bersengketa terkait hasil Pilpres 2024 telah menyerahkan kesimpulan masing-masing.

Tak hanya itu, MK juga telah menerima puluhan amicus curiae yang diajukan berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Tercatat, ada 48 Amicus Curiae yang diajukan dalam

perkara ini per Jumat (19/4). Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah MK menangani perkara PHPU.

Namun, hanya 14 yang dijadikan pertimbangan MK dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Sidang dan RPH atas perkara gugatan hasil Pilpres 2024 ini diikuti delapan dari sembilan hakim MK.

Pasalnya, hakim konstitusi Anwar Usman dikecualikan karena potensi konflik kepentingan selaku paman dari Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, hal tersebut pun telah ditegaskan MKMK beberapa waktu lalu yang menyatakan sebelumnya Anwar melakukan pelanggaran etik berat yang membuat Gibran lolos jadi peserta Pilpres 2024.*

(AMIN) yang telah dibacakan sebelumnya. Serupa atas permohonan Ganjar-Mahfud, MK juga menolak permohonan AMIN untuk seluruhnya.

Dalam konklusi pada permohonan Ganjar-Mahfud, MK menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah

Gerindra Usai Putusan MK: Sejak Hari Ini Prabowo Sah Presiden Terpilih



Sekjen Partai Gerindra menyebut Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Laporan: Listar

JAKARTA- Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024 usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil sengketa Pilpres 2024.

"Sejak hari ini Prabowo dan Gibran dinyatakan sah sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI terpilih hasil Pilpres 2024," kata Muzani dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (22/4).

Muzani menghormati langkah kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud melayangkan gugatan ke MK. Ia men-

gatakan hal itu merupakan hak konstitusional yang melekat pada diri mereka.

Tetapi Muzani meminta ke seluruh pihak agar menghormati putusan MK atas perkara tersebut.

Profil 3 Hakim MK Dissenting Opinion Gugatan AMIN dan Ganjar-Mahfud

"Karena sifat putusan MK adalah final dan mengikat," ujar dia.

MK menolak permohonan gugatan perkara hasil sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Dalam dua perkara tersebut terdapat pendapat berbeda alias dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi. Mereka ialah, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

tidak beralasan menurut hukum. Pihak termohon adalah KPU, sementara pihak terkait adalah paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kemudian, MK menyatakan pihaknya berwenang mengadili permohonan a quo; Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum; dan Permohonan permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

"Mengadili: Dalam

eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan untuk seluruhnya," jelas Suhartoyo saat membacakan amar putusan.

Sebelumnya, MK telah menolak permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin. MK menilai permohonan Anies-Muhaimin tidak beralasan menurut hukum.

Dalam perkara sengketa Pilpres ini, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud selaku pemohon tidak terima dengan hasil keputusan KPU pada 20 Maret lalu yang memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Di sisi lain, KPU duduk sebagai termohon dan Prabo-

Adapun dalam proses menangani dua perkara ini, MK telah menerima puluhan amicus curiae yang diajukan berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Tercatat, ada 48 amicus Curiae yang diajukan dalam perkara ini per Jumat (19/4). Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah MK menangani perkara PHPU.

Namun, hanya 14 yang turut dijadikan pembahasan hakim, karena yang diterima maksimal Jumat (16/4) pukul 16.00 WIB.

Setelah sidang putusan MK ini, KPU memiliki waktu tiga hari untuk menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan Pemilu 2024.*

wo-Gibran duduk sebagai pihak terkait.

Para pihak yang bersengketa terkait hasil Pilpres 2024 telah menyerahkan kesimpulan masing-masing.

Selain itu, MK juga telah menerima puluhan amicus curiae yang diajukan berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Terdapat 48 Amicus Curiae yang diajukan dalam perkara ini per Jumat (19/4). Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah MK menangani perkara PHPU.

Namun, hanya 14 yang dibaca hakim MK yakni yang masuk dengan tenggat waktu 16 April 2024 pukul 16.00 WIB.*

Hakim Saldi, Arief, Enny Kembali Dissenting Opinion di Gugatan Ganjar

Laporan: Hasim

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Namun, ada tiga hakim menyatakan memiliki pendapat

berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan tersebut.

"Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat," ujar

Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan PHPU Pilpres 2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Gedung MK RI, Jakarta, Senin (22/4) sore.

Ketiga hakim itu juga menyatakan memiliki pendapat berbeda pada permohonan yang diajukan pasangan calon 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

<https://www.baubaupost.com>

Rabu, 24 April 2024

Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten/Kota se Sultra Resmi Dibuka



Pewarta: Mashuri

SULTRA, BP- Pj. Gubernur Sultra yang diwakili Sekretaris Daerah Prov. Sultra (Sekda Sultra), Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, membuka secara resmi Jambore Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Prov. Sultra di Lapangan Upacara Kantor Bupati Konawe, (Jum'at, 19 April 2024)

Hadir dalam kegiatan tersebut mendampingi Sekda Sultra; Danlanud Halu Oleo, Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Sultra, Ka. BPKAD, Kadis PTSP, â Kadis Kominfo Sultra, Kadispora Sultra, Ka. DPMD, Ka. BPS-DM, Kadis DLH, Kadis Dukcapil, Ka. BAPEN-DA, Kadis Koperasi & UMKM, Karo pemerintahan, Karo kesra, Plt. Kadis kehutanan, Mewakili Kalak BPBD, perwakilan Karo umum, perwakilan Karo Adpim, Sekdis Kominfo Sultra serta turut hadir Para Bupati/Walikota se-Sultra. Disamping itu juga turut hadir Ketua DPRD Kab. Konawe, Ketua Tim Penggerak PKK Kab/Kota se-Sultra, Para Kepala OPD Kab. Konawe dan Pejabat terkait lainnya serta tokoh masyarakat Konawe.

Pj. Ketua PKK Kab. Konawe, Trinop Trijasari Harmin dalam sambutan menyampaikan bahwa Tim Penggerak PKK perlu merencanakan, melaksanakan langkah kongkrit untuk memperkuat pengorganisasian atau kelembagaan PKK, sebagai lembaga masyarakat yang handal. Selain itu, Trinop Trijasari juga mengungkapkan bahwa Jambore Kader PKK di Konawe menunggu sampai 12 tahun, dan baru terlaksana pada hari ini.

Kemudian sambutan Pj. Bupati Konawe, Dr. H Harmin RambaRamba, SE., MM, dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan suatu kebanggaan bagi Kab.

Konawe karena Jambore Kader PKK dipusatkan di Konawe pada tahun 2024. Pj. Bupati Konawe juga berharap agar pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi ini dapat menjadi babak awal di Kabupaten Konawe.

“mudah-mudahan ini adalah suatu awal kegiatan Provinsi, kita punya obsesi kedepan bukan hanya ditingkat Provinsi kalau perlu di tingkat nasional” ungkapnya.

Lanjut Pj. Bupati Konawe mengatakan “Selaku Penjabat Bupati Konawe menyampaikan terimakasih kasih kepada Pj. Ketua TP. PKK Provinsi. Sultra yang telah memberikan kepercayaan Kab. Konawe selalu penyelenggaraan Jambore PKK. Tentunya harapan kami Jambore hanyalah wadah atau event untuk menyatukan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan, terutama kader-kader PKK se-Sultra.

“Didalam penguatan kelembagaan PKK tersebut harus dilakukan dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan tim penggerak PKK itu sendiri”, lanjutnya.

Lebih lanjut, Pj. Bupati Konawe mengatakan bahwa “kebanggaan bagi Kab. Konawe, ini merupakan kali pertama setelah 12 (dua belas) tahun pelaksanaan Jambore PKK di Sulawesi Tenggara dipusatkan di Kota Padi julukan untuk Kab. Konawe”.

“Terimakasih kepada seluruh Pemda yang mendukung PKK Kab. Konawe sehingga dapat

menjadi tuan rumah pada tahun ini”.

Sambutan dari Pj. Ketua TP. PKK Prov. Sultra, Dra. Wa Ode Munanah Asrun Lio, juga menyampaikan terima kasih untuk penyelenggaraan kader PKK Kab/Kota se-Sultra dan tuan rumah Kab. Konawe yang telah bekerja keras mempersiapkan pelaksanaan acara ini. Selain itu juga, angka prevalensi stunting di Sultra masih cukup tinggi yang berada di angka prevalensi stunting secara nasional, sehingga Tim Penggerak PKK Prov. Sultra akan menerapkan salah satu program unggulan tahun 2024 yaitu pengendalian dan penanganan masalah stunting dengan bekerja sama dan berkolaborasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal di Prov. Sultra.

Jambore Kader PKK tingkat Prov. Sultra merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dan tempat penyelenggaraan secara bergilir di Kab/Kota se-Sultra dan pada tahun 2024 Kab. Konawe mendapatkan giliran sebagai tuan rumah penyelenggara Jambore Kader PKK yang ke-12.

Lanjut, disampaikan bahwa Jambore kader PKK merupakan momentum yang paling strategis bagi kader-kader PKK untuk saling bersilaturahmi, saling bertukar informasi untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dan Jambore kali ini akan dilaksanakan berbagai lomba untuk mendukung pelaksanaan 10

program pokok PKK bagi pengurus dan kader-kader.

Jenis lomba yang akan dilaksanakan pada jambore kali ini yaitu:

1. Lomba parade budaya nasional
2. Lomba paduan suara
3. Lomba cerdas cermat
4. Lomba Jingle Gelari Pelangi
5. Lomba masak non-beras
6. Lomba senam kreasi 6 langkah cuci tangan

Bagi tim penggerak PKK atau kader PKK Kab/Kota yang memperoleh juara 1 dari setiap jenis lomba akan mewakili tim penggerak PKK Prov. Sultra pada Jambore tingkat nasional di Kota Surakarta pada tanggal 15-16 Mei Tahun 2024 mendatang.

Selanjutnya, pada sambutannya Pj. Gubernur Sultra yang diwakili Sekda Sultra menuturkan bahwa kegiatan ini tidak terlepas dari support yang diberikan oleh para Bupati/Walikota selaku pembina dan para Ketua Tim Penggerak PKK Kab/Kota se-Prov. Sultra sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, Jambore seperti ini yang di isi dengan pelaksanaan berbagai lomba antar kader agar dijadikan momentum yang paling berharga untuk memupuk rasa kebersamaan, mempererat hubungan silaturahmi serta menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dan kreativitas para kader.

“Saya berharap agar PKK sebagai mitra pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat agar senantiasa meningkatkan kemampuan manajerial terkait dengan peran, tugas dan fungsi serta mekanisme kegiatan yang profesional sehingga bisa

PKA Angkatan 14 Blended Learning Lingkup Pemprov Sultra Resmi Dibuka Sekda Asrun Lio



Pewarta: Nandar

KENDARI, BP-Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sekda Prov. Sultra), Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D, membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan XIV/14 (Blended Learning), Lingkup Pemerintah Provinsi. Sultra Tahun 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prov. Sultra, (Minggu, 21 April 2024)

Hadir dalam pembukaan tersebut Kepala BPSDM Prov. Sultra, Koord. Widyaiswara BPSDM Sultra, Para Pejabat Struktural/Struktural, Fungsional BPSDM Prov. Sultra, Para Widyaiswara, Fasilitator, Instruktur dan para peserta pelatihan PKA lingkup Pemprov. Sultra yang berjumlah 40 orang

Kepala BPSDM Prov. Sultra, Syahrudin Nurdin., SE, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan PKA ini yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator, sehingga penyelenggaraan pelatihan ini dapat mewujudkan pemimpin yang kompeten dalam manajemen kinerja yang memenuhi kompetensi manajerial administrator yang dipersyaratkan.

Pelaksanaan PKA angkatan 14 ini, selama 105 hari dari kalender

mendukung kerjasama dengan organisasi PD” Kata Sekda Sultra

Sejalan dengan tema yang diusung yaitu: ‘melalui jambore kader PKK kita tingkatkan sinergi dan kreatifitas dalam membangun keluarga berkualitas menu-

pelatihan atau sebanyak 908 Jam Pembelajaran (JP) yang dimulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 18 Juli tahun 2024.

Dalam pelatihan ini juga menggunakan system pembelajaran Blended-Learning atau pembelajaran melalui virtual synchronouse, virtual A-Synchronouse dan pembelajaran klasikal dengan melalui 6 tahapan pembelajaran yaitu:

1. Pembelajaran mandiri terintegrasi ke LAN-RI (LMS)
2. E-Learning (Virtual Synchronouse/By Aplikasi Zoom)
3. Membangun komitmen antara peserta dan pimpinan peserta
4. Pembelajaran klasikal tahap pertama (mulai hari ini sesuai Jadwal dan Materi yang telah disampaikan kepada peserta dan pemateri termasuk studi lapangan, pembimbingan rencana aksi perubahan dan seminar rancangan aksi perubahan)
5. Aktualisasi (unit kerja peserta); dan
6. Pembelajaran klasikal tahap kedua (pembimbingan aksi perubahan, pameran aksi perubahan dan seminar hasil akhir perubahan)

Peserta pelatihan diharapkan mempunyai kompetensi manajerial dan kompetensi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN dan Peraturan Menteri Dalam

ju masyarakat, mandiri, tangguh dan inklusif untuk mewujudkan Indonesia maju’, untuk itu perlu memberi perhatian kepada kader-kader PKK seluruh jenjang, mulai dari Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta desa.

Negeri No. 108 tahun 2017 tentang kompetensi Pemerintahan dengan melalui 4 (empat) agenda pembelajaran yakni:

1. Agenda kepemimpinan pancasila dan nasionalisme
2. Agenda kepemimpinan kinerja
3. Agenda manajemen kinerja
4. Agenda aktualisasi kepemimpinan

“Ini merupakan angkatan pertama yang kita laksanakan secara Blended Learning yang lalu lalu belum 100%, sehingga diperlukan komitmen dan keseriusan dalam mengikuti kegiatan ini bagi masing-masing peserta dan kami mengingat bahwa jangsan sampai hanya alpa yang melebihi 27 JP secara kumulatif, sehingga yang kemarin-kemarin bisa kami bantu, untuk angkatan ini di monitor langsung LAN RI sehingga absensinya harus terpenuhi” Ucapan Syahrudin Nurdin

Kemudian, dalam Sambutannya Sekda Sultra mengatakan bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDM mewajibkan setiap ASN mengikuti pelatihan ini, bagi para ASN di latih dan diberikan bekal manajerial, kepemimpinan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai pejabat administrator.

Diharapkan kepada seluruh peserta PKA dapat mengadaptasi semua pembelajaran yang didapatkan dan mengimplementasikan didalam kegiatan sehari-hari dalam mengembang tugas pokok dan fungsinya

Sebagai simbol dibukanya kegiatan tersebut, Sekda Sultra didampingi Pj. Ketua PKK Sultra bersama Pj. Bupati Konawe dan Pj. Ketua PKK Kab. Konawe melakukan penguntingan pita yang mengikat balon. (I*)

Orasi Budaya Pj Gubernur Sultra ABR: Hukum Progresif, Data Budaya Pancana, dan Kesejahteraan Rakyat.



Laporan: Ardi

BUTENG, BP- Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, dianugerahi gelar adat "Kolakino Liwu Pancana" oleh Lembaga Adat Buton Tengah. Gelar ini mengandung pengertian "Bangsawan yang paling dimuliakan di Negeri Pancana".

Pemberian gelar berlokasi di Kantor Lama Bupati Buton Tengah. Andap menyampaikan orasi budaya dengan judul "Hukum Progresif Lahirkan Data Budaya Pancana untuk Kesejahteraan Sosial".

Selain sebagai Pj. Gubernur Sultra, saat ini Andap masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia. Dalam orasi budayanya ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

"Seluruh kebijakan yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Daerah harus berpijak dan berpayung hukum," papar Andap, Jumat (19/04/2024)

"Oleh sebab itu, hukum sesungguhnya bukan hanya seperangkat aturan dan penegakan yang terbatas pada penanganan kasus pidana dan perdata warga negara. Bahkan kebijakan pembangunan di segala bidang, dari mulai riset, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya pun harus memiliki dasar hukum."

Perspektif hukum progresif yang ditawarkan Andap, setidaknya meliputi tiga postulat.

Pertama, hukum bukan sebatas rangkaian norma dan logika hukum yang termuat dalam pasal dan ayat, hukum harus bersifat dan berwatak progresif.

Kedua, hukum progresif merupakan hukum yang menitikberatkan pada berfungsinya hati nurani, terutama pada diri para pejabat publik dan penegak hukum.

Hati nurani di dalam cara pandang hukum progresif, bukan sesuatu yang utopis (mengawang-awang, tidak membumi). Bagi Andap hati nurani harus bisa diimplementasikan melalui empati, kejujuran dan kebenaran.

Ketiga, dalam sistem ketatanegaraan suatu Negara Hukum, maka hati nurani hanya dapat dipraktekan dan berkekuatan hukum, apabila tercermin dalam muatan pasal dan ayat pada berbagai Peraturan Perundangan dari Pusat hingga Daerah.

"Dalam perspektif hukum yang saya dalam, bahkan perubahan sosial, termasuk kesejahteraan sosial pun tidak akan terwujud tanpa hukum progresif," tegas Andap.

"Saya berpendapat dan meyakini bahwa hukum progresif adalah hukum yang sejwi dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Tiga esensi hukum progresif bagi Andap, yaitu pertama merupakan aturan positif negara yang sejatinya harus mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

hukum yang memenuhi rasa keadilan publik.

Kedua, hukum progresif adalah hukum yang membuka ruang bagi aspirasi dan partisipasi rakyat (dalam hal ini publik) di dalam pembangunan di segala bidang kehidupan, guna tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ketiga, implementasi hukum progresif membuka ruang bagi Pemerintahan yang berjalan berdasarkan data yang akurat, aktual dan relevan. Andap berpandangan, "data tersebut hanya bisa diproduksi jika ada norma hukum atau peraturan perundangan progresif, yang memerintahkannya."

Andap menceritakan bahwa berdasarkan pertimbangan atas pemahaman hukum progresif sebagai Pj. Gubernur ia berjuang keras untuk lahirnya kebijakan hukum progresif, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Daerah Sulawesi Tenggara Berbasis Data Presisi.

Perda tersebut diluncurkan ke publik pada acara Musrenbang Sultra 2024 (18/04/2024) di Kendari.

"Peraturan Daerah ini menjadi landasan penting bagi lahirnya kebijakan pembangunan di segala bidang yang berpedoman pada data dasar yang akurat, aktual dan relevan. Dengan demikian, maka pembangunan pun menjadi lebih tepat sasaran, efektif, efisien dan transparan, serta mampu semakin meminimalisir penyimpangan anggaran negara."

Andap memaknai ge-

lar adat dari Ketua Lembaga Adat dan Anggota Perangkat Lembaga Adat Kabupaten Buton Tengah yang diterimanya sebagai bertambahnya tanggung jawab yang disematkan di pundak saya.

"Insya Allah, gelar ini merupakan jalan kebudayaan, jalan perubahan sosial, jalan yang juga membutuhkan data yang mampu menggambarkan potensi dan kondisi riil budaya Sulawesi Tenggara khususnya di Kabupaten Buton Tengah."

Andap berpendapat bahwa data budaya acapkali luput dari perhatian semua Instansi, padahal data budaya adalah aset serta potensi yang merupakan modal dan kekuatan ekonomi untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.

Pj. Gubernur Sultra ini mengambil contoh ekonomi Korea yang menguat melalui industri kebudayaan yang ditopang riset untuk reproduksi data budaya. Menurutnya, dengan kekuatan potensi budaya Korea yang tergambarkan dalam data budayanya, dunia pun diguncang dengan tersebarnya budaya Korea secara global mulai tahun 1990-an, yang dikenal dengan Korean Wave.

"Hidup ini singkat, saya tidak ingin sia-siakan amanah dari Ketua Lembaga Adat Beserta Anggota Perangkat Lembaga Adat Kabupaten Buton Tengah. Karena itu, saya berikan dukungan penuh kepada Pemkab Buton Tengah untuk segera menerbitkan aturan hukum, berupa Peraturan Bupati Ten-

Pj Bupati Buteng Andi Muh Yusuf Hadiri Festival Kande-Kandea Tolandona 2024



Laporan : Ardi

BUTENG, BP- Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf menghadiri Festival Kande-kandea Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Sabtu (20/4/2024).

Kegiatan Festival budaya Kande-kandea Tolandona berlangsung meriah dihadiri dan disaksikan ribuan pasang mata yang memenuhi lapangan Lamedadi Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu.

Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf dalam sambutannya mengatakan, Pekandekandea merupakan acara adat yang sudah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat Buton Tengah.

"Tradisi Pekandekandea ini merupakan pesta rakyat tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolandona. Tradisi ini sesungguhnya menyambut dan merayakan para kesatria yang menjaga keutuhan kesultanan Buton", Kata Pj

tang Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Tengah Berbasis Data Presisi, "tegas Andap.

Pada orasinya Andap, selaku Pj. Gubernur Sultra telah menginstruksikan kepada jajaran Pemprov Sultra untuk memberikan dukungan kebijakan anggaran, pendampingan dan sumber daya lainnya kepada Kabupaten Buton Tengah untuk segera menjalankan pendataan presisi di 67 Desa/10 Kelurahan. Ia memerintahkan agar melibatkan Perguruan Tinggi dan juga Masyarakat Adat agar pendataan mampu melahirkan data budaya

Bupati.

Para kesatria tersebut mendapat pelayanan khusus dari kesultanan Buton berupa makan dengan cara unik ala kesatria Buton yang disebut kande tompa, yang disuapi oleh para putri keraton.

Pekandekandea di perkenalkan pada tahun 1597 pada saat kepemimpinan Sultan Buton ke IV Dayanu Ikhsanuddin dan Iman Masjid Agung Keraton Buton Sangia Wambulu. Hingga saat ini tradisi ini masih terpelihara dengan baik. Tradisi Kande-kandea di kemas sejalan dengan nilai ajaran islam.

Selanjutnya, pelaksanaan Pekandekandea dilaksanakan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan sebagai ajang silaturahmi dan ungkapan rasa syukur terhadap karunia Allah SWT kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

"Pekandekandea ini memiliki makna yang mendalam. Memberikan pesan sosial yang senantiasa harus dijaga, dimana tradisi membuahkan kekoko-

berwujud (tangible) dan tak berwujud (intangible) Bumi Pancana pun akurat dan aktual.

Data budaya hanya untuk inventarisir aset budaya. Andap menjelaskan, "data budaya menjadi modal industri budaya yang berkarakter Indonesia. Data budaya Pancana yang kita perjuangkan adalah data yang bersifat dinamis.

Data tersebut menggambarkan potensi ekonomi yang jika dikelola dengan baik dan benar akan menjadi kekuatan ekonomi."

Di akhir orasi budaya, Andap menyitir falsafah Buton, yaitu: Yinda-Yindamo Arataa Soma-

han dan kekerabatan, jalin silaturahmi serta terpeliharanya kekeluargaan masyarakat Tolandona dan masyarakat lainnya", tuturnya.

Selain itu kata Pj Bupati, pelaksanaan Kande-kandea merupakan wahana pelestarian kebudayaan yang perlu di wariskan dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Kita berharap, dengan semakin dikenalnya keanekaragaman budaya maka akan mendorong rasa cinta dan rasa memiliki oleh generasi selanjutnya.

"Saya berharap, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Kande-kandea dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat dalam membangun dan mengisi pembangunan di Buton Tengah. Mari kita jaga dan pelihara nilai-nilai tradisi kearifan lokal, terus berjuang untuk mempertahankan tradisi dan kebudayaan kita jangan sampai tergerus oleh arus liar yang tidak jelas muaranya, tingkatkan martabat sebagai bangsa yang berperadaban tinggi", tutupnya. (*)

nama Karo (Harta Rela Dikorbankan Demi Keselamatan Diri), Yinda-Yindamo Karo Somanamo Lipu (Diri Rela Dikorbankan Demi Keselamatan Negeri), Yinda-Yindamo Lipu Somanamo Sara (Biarlah Negeri Hancur Asal Pemerintah/Adat Selamat), Yinda-Yindamo Sara Somanamo Agama (Biarlah Pemerintah/Adat Hancur Asal Agama Tetap Selamat).

Keempat falsafah tersebut merupakan implementasi dari Bhincibhinciki Kuli (Apabila mencubit diri sendiri terasa sakit, maka jangan lakukan hal serupa kepada orang lain).(*)

Seleksi Anggota Paskibraka Kota Baubau Tahun 2024 Dimulai



Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Baubau tahun 2024 yang dibuka oleh Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si di aula kantor Wali Kota Baubau

Laporan: Andina L

BAUBAU, BP--Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Baubau tahun 2024 yang dibuka oleh Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si di aula kantor Wali Kota Baubau Rabu (17/4/2024) mulai dilaksanakan.

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si mengatakan, seleksi Paskibraka itu akan menjadi catatan besar dalam perjalanan hidup. Seleksi itu adalah bagian pertama dalam melaksanakan atau menjalankan yang akan tertuai dalam catatan diri. "Dalam menjalankan semua kompetisi menjalankan semua seleksi bukan hanya hari ini, mungkin nanti ujian, ujian masuk perguruan tinggi dan selanjutnya sampai kita pensiun semua ada kompetisinya, ada tahapan seleksinya. kami juga dari

pemerintah TNI, Polri itu ada tahapan seleksinya untuk naik level,"ujarnya. Orang nomor satu di Kota Baubau ini selalu mengingatkan, dalam menghadapi seleksi tidak bisa serba merta ikut saja, harus menyiapkan diri. Siapkan diri yang terbaik anggap dalam persiapan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu adalah seleksi di hari H. Dan pastikan Kesehatan harus maksimal. persiapan pada hari H harus ideal semua, harus optimal semua persiapannya. Dan apapun hasilnya searahkan ke Yang Maha Kuasa serta yakinlah bahwa semua panitia

seleksi, semua penyeleksi itu akan melakukan seleksi se ideal mungkin. dan akan memberikan kesempatan yang terbaik buat anak-anak daerah. Menurut Dr Muh Rasman Manafi, menjadi pengibar bendera pusaka yang di tugaskan oleh Pemerintah Kota Baubau Sulawesi Tenggara mulai dari Kota, Provinsi dan Nasional pastikan bahwa apa yang diberikan setelah di t e t a p k a n adalah yang ter-

baik dari semua sisi.

keteladanan, agama, perilaku, pikiran berikan yang terbaik karena itu akan menjadi pelajaran yang berharga dalam menjalani kehidupan selanjutnya.

Dr Muh Rasman Manafi berpesan bahwa kegiatan seperti ini jadikan sebagai moment untuk membangun kekompakan, persaudaraan di lingkungan kota. Pihaknya tidak mau mendengar ada anggota seleksi putus silaturahmi, putus persaudaraan karena itu adalah bagian dari kegagalan yang di peroleh. Setiap menghadapi seleksi pada saat masuk ruangan seleksi maka dipastikan semua adalah saudara sehingga pada saat dia terpilih atau tidak adalah saudara.

Sementara itu, anggota Paskibraka yang akan mengikuti seleksi berjumlah 121 peserta Dan yang akan mengisi saat ini 2 orang untuk nasional, dan yang di kirim ke provinsi berjumlah 4 peserta. (*)

Ibu Reffiani Dwiatmo Rasman Motivasi Duta Genre Baubau 2024, Berikut Nama, Asal Sekolah dan Kelurahan Duta Genre Baubau

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Ibu Reffiani Dwiatmo Rasman, ST sebagai Ketua Penggerak PKK Kota Baubau saat menerima perwakilan Duta Genre Kota tahun 2024. Selasa

(16/4/2024) bertempat di Rujab Wali Kota Baubau memberikan motivasi kepada duta genre Kota Baubau yang akan mengikuti Pemilihan Duta Genre Tingkat Provinsi tahun 2024 di Kendari pada tanggal 23 sampai dengan

27 April 2024.

Menurut ibu Reffiani Dwiatmo Rasman, anak-anak Baubau agar senantiasa berbuat yang terbaik, juga memberikan beberapa materi tambahan terkait pentingnya budaya membaca se-

hingga dapat dimasukkan dalam program kerja duta genre Kota Baubau terpilih yaitu Genre Kembangkan Literasi (genbate). Genre kembangkan literasi (genbate) merupakan program genre mengajak rema-

Pemkot Baubau Tempuh Jalan Terbaik Selesaikan Persoalan SDN 2 Wajo

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP--Menyikapi penyegelan terhadap SDN 2 Wajo yang dilakukan oleh pengacara dari ahli waris lahan SDN 2 Wajo maka Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau akan menempuh yang jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan SDN 2 Wajo Baubau dengan ahli waris dan pengacara.

Hal ini diungkapkan Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau La Ode Darussalam, S.Sos M.Si ketika ditemui di ruang kerjanya Jumat (19/4/2024).

Menurut La Ode Darussalam, berdasarkan petunjuk Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si, pihaknya diperintahkan agar secepatnya menemui pihak ahli waris termasuk pengacara ahli waris agar duduk bersama membahas persoalan



La Ode Darussalam

tersebut.

Karena itu, untuk menindaklanjuti petunjuk dari Pj Wali Kota Baubau tersebut, selaku Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan dirinya langsung berkoordinasi Pj Sekda Kota Baubau Saido Bonasai, S.Sos, M.Si, Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si, Kepala BPKAD Siti Munawar, S.STP, M.Si, dan Kabag Hukum Dr Hamzah. (*) Berdasarkan ha-

sil koordinasi dengan Pj Sekda maka Pj Sekda meminta pertemuan akan dilakukan pada hari Senin (22/4/2024) yang dihadiri Pj Sekda, Asisten I Setda, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BPKAD, Kabag Hukum Setda Kota Baubau, ahli waris dan pengacara untuk menyelesaikan persoalan SDN 2 Wajo tersebut, (*)



ja untuk giat berliterasi untuk kembangkan wawasan dan potensi minat baca bagi generasi remaja.

Ibu Reffiani Dwiatmo Rasman menyampaikan selalu optimis dan berani mengambil langkah-langkah. "Soal juara itu nomor 2 yang terpenting adalah bagaimana memberikan perjuangan terbaik untuk

Kota Baubau,"ujarnya. Sementara itu, nama perwakilan Duta Genre putra dan putri yang akan mewakili Kota Baubau:

1. Muh. Kasyful Ashrar (Winner Duta Genre Putra Kota Baubau Tahun 2024) asal SMA 1 BAUBAU
2. Nielsya Nanda Shafira (Winner Duta Genre Putri Kota

Baubau Tahun 2024) asal SMA 2 BAUBAU

3. Fajar Bakti Suprpto (Runner Up 1 Duta GenRe Putra Kota Baubau Tahun 2024) asal MAN 1 BAUBAU
4. Nur Aliyah Alsaf (Runner Up 1 Duta Genre Putri Kota Baubau Tahun 2024) asal Kelurahan BAA-DIA. (*)

Harian Pagi
Baubau Post
Kritik, Lugas, Independen
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik
Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky TA
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisna

Layouter : Ririn
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu,
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Bharada E Mantan Anak Buah Sambo Resmi Menikah di Manado



Bharada E resmi menikah usai sempat ditahan karena kasus pembunuhan.

Laporan: Hamid

JAKARTA-Mantan terpidana kasus pembunuhan yang melibatkan eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharade E resmi menikah dengan kekasihnya, Duce Maria Angelina Kristanto alias Lingling, Sabtu (20/4).

Hal ini telah dibenarkan oleh Pengacara Bharada E, Ronny Talapessy. Ia mengatakan Bharada E menikah di Manado, Sulawesi Utara.

"Betul, (pernikahan dilaksanakan Sabtu kemarin)" kata Ronny seperti dikutip dari detik.com, Minggu (21/4).

Ia mengatakan pemberkatan dilaksanakan di Gereja Katolik Raja Damai. Ronny lantas memohon doa restu untuk pernikahan Bharada E dan Lingling.

"Mohon doa restu untuk adik Eliezer dan Lingling. Kami keluarga ikut mendukung dan mendukung, saya ditunjuk

sebagai saksi di gereja dan catatan sipil. Resepsi di salah satu gedung di Kota Manado," ucap Ronny. Bharada E bebas dari masa tahanan sejak Agustus tahun lalu. Ia terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Bharada E bebas usai mendapatkan cuti bersyarat per Jumat, 4 Agustus 2023. Saat itu status Richard berubah dari terpidana menjadi klien pemsarakatan.

"Betul, per tanggal 4 Agustus kemarin Eliezer sudah menjalani program Cuti Bersyarat (CB) dan telah berubah

statusnya dari narapidana menjadi klien Pemsarakatan," ujar Kabag Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham Rika Aprianti, 8 Agustus 2023.

Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemsarakatan (Lapas) bagi narapidana yang dipidana paling lama 1 tahun 3 bulan penjara. Richard divonis dengan 1,5 tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana berencana Yosua.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, Cuti Bersyarat diberikan

kepada narapidana yang memenuhi syarat sebagai berikut: dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan; telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit enam bulan; dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat enam bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.

Pernikahan ini disebut sempat tertunda akibat kasus tewasnya Brigadir J imbas pembunuhan berencana yang dilakukan bekas perwira tinggi Ferdy Sambo.

Bharada E sempat meminta Ling Ling untuk menunggu, karena saat itu ia harus ditahan selama beberapa bulan karena mendapat pemangkasan. (*)

Alex Marwata Dilaporkan ke Polisi soal Bertemu Tersangka Eko Darmanto

Pewarta: Alwan

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas pertemuannya dengan tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang sekaligus mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto.

Saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Alex membenarkan hal tersebut. Ia menilai ada pihak-pihak tertentu yang sedang mencari kesalahan pimpinan KPK dan membuat gaduh.

"Saya enggak habis pikir orang yang melaporkan seperti ini memang ingin mencari-cari kesalahan pimpinan dan menginginkan KPK selalu gaduh," ujar Alex dalam keterangan tertulis, Senin (22/4).

Pada Senin ini, Polda Metro Jaya mengundang Staf KPK untuk mengklarifikasi soal pertemuan Alex Marwata dan Eko Darmanto yang dilaporkan itu.

"Saya belum dipanggil. Baru staf yang diundang untuk klarifikasi," ujar Alex saat dikonfirmasi kembali oleh CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, Alex mengkonfirmasi dirinya memang pernah bertemu dengan Eko. Hanya saja, pertemuan tersebut turut didampingi oleh pihak pengaduan masyarakat (Dumas) dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan lain.

"Betul saya bertemu ED [Eko Darmanto] di kantor didampingi staf dumas dan seizin serta sepengetahuan pimpinan lainnya. Waktunya sekitar awal Maret 2023. ED melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam importasi emas, HP [ponsel], dan besi baja," terang Alex.

Pengakuan itu senada dengan informasi yang diterima media ini dari sumber yang enggan disebut identitasnya. Media ini sudah menghubungi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi untuk mengonfirmasi laporan dan agenda klarifikasi tersebut, namun belum diperoleh jawaban.

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita Alat Berat dan Pemurnian di Babel



Penyidik Kejagung kembali menyita aset PT RBT di Babel terkait kasus korupsi timah yang menjerat Harvey Moeis.

Laporan: Hamid

JAKARTA-Kejaksaan Agung kembali menyita sejumlah barang bukti milik PT Refined Bangka Tin (RBT) terkait kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan penyitaan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus usai menelusuri aset aliran korupsi di wilayah Bangka Belitung.

"Dari hasil penelusuran, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap PT RBT di Kabupaten Bangka beserta sejumlah aset yang terdapat di dalamnya, antara lain berupa alat berat dan alat pemurnian bijih timah," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Senin (22/4).

Sebelumnya, Kejagung juga telah me-

nyita empat smelter dengan total luas tanah sebesar 238.848 meter persegi dari empat perusahaan beserta sejumlah alat berat di Bangka Belitung.

Keempat smelter yang disita itu merupakan fasilitas pemurnian timah milik CV VIP beserta satu bidang tanah lainnya dengan luas 10.500 meter persegi.

Kemudian smelter milik PT SIP beserta beberapa bidang tanah dengan total luas 85.863 meter persegi. Ketiga smelter milik PT TI beserta beberapa bidang tanah dengan total luas 84.660 meter persegi dan smelter milik PT SBS beserta beberapa bidang tanah seluas 57.825 meter persegi.

Kejagung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai

dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Kejagung menyebut nilai kerugian ekologis dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp271 triliun berdasarkan hasil perhitungan dari ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.

Nilai kerusakan lingkungan terdiri dari tiga jenis yakni kerugian ekologis sebesar Rp183,7 triliun, ekonomi lingkungan sebesar Rp74,4 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp12,1 triliun.

Kejagung menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Kejagung menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu. (*)



Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

da dengan informasi yang diterima media ini dari sumber yang enggan disebut identitasnya.

Media ini sudah menghubungi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak

dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi untuk mengonfirmasi laporan dan agenda klarifikasi tersebut, namun belum diperoleh jawaban.

Eko diproses hukum KPK atas kasus dugaan penerimaan

gratifikasi sebesar Rp10 miliar dan akan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu, baru-baru ini, Eko ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (*)

Dr Rasman Manafi : Bagaimanapun Saya Akan Membela Nelayan Baubau



Pj Walikota Baubau Dr Rasman Manafi bertemu dengan perwakilan nelayan

Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP-Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi SP MSi mengharapkan peran serta semua pihak untuk mendukung langkah membangun industri perikanan di Kota Baubau, terutama nelayan Baubau yang selama ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah dalam menjalankan aktifitas.

“Saya berharap nelayan kita bisa memahami ini. Kalau selama ini hasil tangkapan ikan mereka dibongkar di wilayah, akan sangat sulit bagi kita untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan terutama jika mengharapkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Karena kita akhirnya tidak punya data produksi ikan kita, justru malah daerah lain yang diuntungkan, padahal ikan-ikan itu adalah hasil tangka-

pan nelayan Baubau,” jelasnya.

Dalam pertemuan pagi hari di Rumah Jabatan Walikota Baubau Senin (15/4/2024), turut hadir sejumlah perwakilan nelayan Bone-Bone, Lurah Bone-Bone Ramadan, Camat Batupoaro Ikbal Jalaluddin, Kadis Perikanan Kota Baubau Yuli Widiarti, ST, M.Si dan Jajaran, Kadis Perdagangan dan Industri Kota Baubau H La Ode Ali Hasan, SE, M.Si dan Asisten 2 Kota Baubau Dra Hj

Asmahani, M.Si.

Pada kesempatan itu perwakilan nelayan menyampaikan keluhan kurangnya dukungan es untuk melaut serta model transaksi yang belum memuaskan serta proses perizinan berlayar yang masih memakan waktu. Menanggapi hal tersebut, Dr Rasman Manafi menyatakan akan segera mencari solusi.

“Bagaimanapun saya akan membela nelayan Baubau untuk dapat menjalankan

pekerjaannya dengan baik. Soal es segera kita selesaikan dengan mengaktifkan fasilitas yang ada di TPI Wameo untuk sementara dan bahkan kita akan bangun yang baru. Mengenai model transaksi, kalau perlu melibatkan pengusaha. Sedangkan soal perizinan, kita berkomunikasi dengan pihak Syahbandar dan mencari apa masalahnya, jika mereka tidak bisa memutuskan, kita akan naikan level komunikasinya,” tegas orang nomor satu Baubau ini.

Dengan semua upaya itu, Dr Rasman Manafi berharap peningkatan kesejahteraan nelayan Baubau dapat terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. (*)

Dr Muh Rasman Pastikan Semua Wilayah Dapat Diakses Dengan Mudah



Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat pelaksanaan pesta adat Kasambu-Sambu di Kelurahan Kolese dan Halal Bi Halal di Kelurahan Lowu-Lowu Minggu (14/4/2024) mengatakan, semua perencanaan pembangunan harus memastikan semua titik di Kota Baubau dapat di akses secara mudah bukan hanya dari laut dan udara termasuk internet di semua wilayah kelurahan yang ada di Kota Baubau termasuk dua kelurahan yang saat ini akses internetnya susah sekali internet harus menjadi bagus.

“Saya mempunyai data bahwa terdapat 2 kelurahan susah sekali internet. Kominfo pastikan 2 kelurahan ini akses internetnya harus bagus karena bagaimana mungkin kita membangun Kota Baubau kalau konektivitasnya kita tidak bangun, mau kita bikin pabrik sebesar apapun kalau aksesnya itu terganggu tidak akan berkembang itu

wilayah, ujarnya.

Ditambahkan, Kota Baubau telah menjadi wilayah penghubung timur Indonesia ke Barat Indonesia, begitu juga utara ke selatan Indonesia. Oleh sebab itu, kalau menjadi wilayah penghubung, harusnya konektivitasnya itu lancar dan tidak boleh ada di wilayah di Kota Baubau yang susah dijangkau, baik darat, udara apalagi laut.

Karena itu, jikalau ada wilayah Kota Baubau di 43 kelurahan ini yang sulit terjangkau atau menjangkau itu berat maka itu adalah tanggung jawab Pemkot Baubau agar 43 kelurahan itu dapat terjangkau dengan mudah.

“Sama halnya misalnya kalau saya mau ke Katobengke atau saya mau ke Surawolio, harusnya saya mengakses ke sana itu sama mudahnya dengan saya datang ke Kolese atau ke Lowu-lowu Nah mengakses itu kan yang utama adalah jalannya. Saya sudah sampaikan, saya perintahkan ke OPD Kota Baubau, jadikan prioritas. Kalau 10 tahun lalu sudah diaspal, harusnya 5 tahun lalu ini sudah diaspal juga jalan yang menuju wilayah ini. Dan ini akan menjadi prioritas. Kalau 10 tahun lalu sudah diaspal, harusnya ini sudah diaspal juga jalan yang menuju wilayah ini akan menjadi prioritas,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam 20 tahun kedepan, pihaknya sudah merencanakan Baubau untuk

menjadi wilayah maritim penghubung antar timur Indonesia dan barat Indonesia. Sesungguhnya ini rencana untuk menjadikan Baubau seperti itu bukan baru tahun ini. Tetapi sejak 400 tahun yang lalu, Baubau masih menjadi ibu kota kerajaan Buton, ibu kota Kesultanan Buton, ibu kota Kabupaten Sulawesi Tenggara, ibu kota Kabupaten Buton dan sampai hari ini menjadi Kota Baubau.

Sementara itu, terkait dengan acara pesta adat orang nomor satu di Kota Baubau ini menjelaskan, hal ini adalah sebuah bagian dalam upaya melestarikan budaya untuk memperkuat silaturahmi, memperkuat kerukunan antar masyarakat. Sehingga ini sangat baik tentu juga bisa di lakukan wilayah-wilayah lain bagaimana dia membuat suatu kegiatan adatnya dilestarikan sekaligus dia memperkuat hubungan silaturahmi antar masyarakat apalagi wilayah Kota Baubau yang sangat beragam.

Demikian pula dengan setiap lebaran ada moment hal bi halal juga baik sekalian ketemu semua yang pulang kampung bisa ketemu sama keluarga-keluarganya dan sangat baik jika dilestarikan di Kota Baubau sebagai negeri yang sudah tua, punya banyak budaya. “Harapan saya terus ini di pertahankan, lanjutkan kemudian yang paling penting jangan sampai membebani masyarakat. Tapi kalau dalam bentuk rasa syukur saya kira setiap orang itu ingin menyumbangkan yang terbaik buat keluarganya, buat masyarakatnya,” tutupnya. (*)

Pesta Adat Kasambu Sambu Tradisi Tua Masyarakat Kolese Terus Terpelihara

Pewarta: Amran

BAUBAU, BP-Kasambu-Sambu adalah tradisi tua yang ada di Kolese, namun tradisi ini populer sejak La Puli (Ma Zanibu) menjabat sebagai Kepala Kampung pada penghujung tahun 1950an hingga awal tahun 1960an. Kemudian dilanjutkan oleh Kepala-Kepala Kampung Kolese lainnya, seperti La Ode Basiri, La ode Nusuri, La Goea, La Ilimu dan La Mane, setelah itu terhenti beberapa lama. Pada tahun 1997 saat Kolese menjadi sebuah desa baru, yakni Desa Kolese di era Bapak Nasihu sebagai Kepala Desa di saat itu, maka Kasambu sambu di gelar Kembali dan terus terpelihara hingga sekarang ini.

Salah seorang tokoh masyarakat Kelurahan Kolese yang juga Asisten I Setda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si mengatakan, dalam tradisi

adat Kasambu-Sambu disiapkan berbagai kuliner tradisional Buton yang diletakkan pada sebuah talam. Setiap kuliner yang disajikan memiliki makna filosofis tersendiri yang berkaitan dengan alam dan manusia. Pada setiap talam akan dijaga oleh seorang gadis dengan dandanannya istimewa dan busana adat Buton. Tradisi adat ini memberikan kesempatan kepada para pemuda Kolese yang kembali dari perantauan untuk dapat memilih pasangan hidup di Kolese kampung halamannya, sehingga kemanapun mereka pergi merantau selalu akan pulang dan mengingat kampung halaman tercinta.

Menurut La Ode Aswad, upacara adat Kasambu-Sambu diawali dengan tari Mangaru yang diikuti dengan tabuhan gendang, menunjukkan ketangkasan para pemuda Kolese di era Kesultanan. Jika ada yang

hendak menyerang Buton, para pemuda Kolese akan tampil di garis depan untuk menjaga harkat, derajat dan martabat orang Buton. Setelah tari Mangaru akan ada 2 (dua) orang tetua adat yang saling memberi minum sebagai sebuah tanda pembuka tradisi adat Kasambu-Sambu. Kemudian Imam Masjid Kolese akan memimpin do’a yang dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan rezeki dan hasil panen masyarakat Kolese selama setahun terakhir serta ungkapan rasa syukur atas ke Hadirat masyarakat Kolese dari perantauan dan doa ini diperuntukkan pula agar prosesi adat Kasambu-Sambu berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

Selanjutnya seorang tetua adat memberikan aba-aba agar para tetua dan tamu undangan untuk segera disuapi dengan kata “Tompa

Laijo” maka para gadis ini dengan serentak menyupi siapa yang ada didepan talam mereka, dengan serentak para tetua adat dan undangan segera mencicipi apa yang disuapkan kepada mereka. Aba-aba yang diberikan oleh tetua adat ini memberikan gambaran keompakan, persatuan dan kebulatan tekad seluruh masyarakat Kolese dalam satu tekad yang sama. Setelah para tetua dan tamu undangan di suapi oleh para gadis gadis, maka mereka akan meletakkan sejumlah uang di sela-sela talam sebagai bentuk rasa terima kasih atas jamuan yang telah diberikan.

Hal ini memberikan pembelajaran jika pentingnya memberi penghargaan dan apresiasi kepada orang lain atas segala perbuatan baik yang dilakukannya. Berikutnya akan diberikan kesempatan kepada para pemuda untuk disuapi oleh gadis-gadis

dan setelah disuapi akan menyelipkan sejumlah uang di sela-sela piring yang ada pada talam makanan dan jika ada pemuda yang menyukai salah seorang gadis maka akan melemparkan sapu tangan pada gadis yang dimaksudkannya. Setelah para pemuda disuapi oleh gadis-gadis penjaga talang, maka berakhir tradisi adat Kasambu-Sambu. Sebagai penutup acara akan dlakhiri pula dengan tari mangaru.

Sementara itu, pesta ada Kasambu-Sambu masyarakat Kolese pada Minggu (14/4/2024) tu-



rut dihadiri langsung Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si, ibu Reffiani Dwiatmo Rasman, ST, unsur Forkompinda, anggota DPRD, kepala OPD, Camat dan Lurah

se Kota Baubau. Saat menghadiri kegiatan tersebut Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si dan Ibu Reffiani Dwiatmo Rasman, ST disambut tarian penyambutan Kesultanan Buton yakni tarian Galangi. (*)